



EMANSIPASI ATAU DINASTI? ANALISIS KRITIS PUAN MAHARANI DALAM POLITIK INDONESIA

EMANCIPATION OR DYNASTY? A CRITICAL ANALYSIS OF PUAN MAHARANI IN INDONESIAN POLITICS

Ira Nurhidayah¹, Anita Louis Br Tumeang², Rizkyna Halyza³, Oktunem Silitonga⁴, Zuhra Al-Husna⁵, Jonathan Marpaung⁶, Ria Manurung⁷, Silvia Annisa⁸

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara

Email: iranurhidayah@students.usu.ac.id

Article Info**Article history :**

Received : 24-09-2025

Revised : 25-09-2025

Accepted : 27-09-2025

Published : 30-09-2025

Abstract

The Indonesian political landscape cannot be separated from the persistence of political dynasties that position elite families as dominant actors in the struggle for power. At the same time, the increasing involvement of women in politics is often regarded as a milestone of gender emancipation. This paradox is clearly reflected in the figure of Puan Maharani, granddaughter of Soekarno and daughter of Megawati Soekarnoputri, who became the first female Speaker of the Indonesian House of Representatives (DPR RI). This article aims to critically examine whether Puan's political achievements represent genuine emancipation of women or the reproduction of political dynasties. The study employs a literature review method with a descriptive qualitative approach, drawing on recent academic sources (2016–2025) on women in politics, political dynasties, and Puan Maharani's profile. The analysis reveals that Puan's success can be viewed as a symbol of women's political emancipation, as she has broken male dominance in parliament and inspired broader female participation in politics. However, her rise is also inseparable from genealogical legitimacy as part of the "Soekarno lineage," which provides access to social, symbolic, and political capital. In conclusion, Puan Maharani embodies a dual symbol: on the one hand, an inspiration for women's emancipation in politics, and on the other, a representation of entrenched political dynasties that may limit substantive democracy and access to power for women outside the elite circle.

Keywords: *Puan Maharani, Political Emancipation, Political Dynasty.*

Abstrak

Fenomena politik Indonesia tidak bisa dilepaskan dari praktik dinasti politik yang masih mengakar kuat dan menempatkan keluarga elite sebagai aktor dominan dalam perebutan kekuasaan. Di sisi lain, meningkatnya keterlibatan perempuan dalam politik sering dipandang sebagai capaian emansipasi gender. Paradoks ini terlihat jelas pada sosok Puan Maharani, cucu Soekarno dan putri Megawati Soekarnoputri, yang berhasil menduduki posisi strategis sebagai Ketua DPR RI perempuan pertama. Artikel ini bertujuan menganalisis secara kritis apakah pencapaian politik Puan lebih merepresentasikan emansipasi perempuan atau reproduksi dinasti politik. Penelitian menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif, berdasarkan sumber-sumber akademik terkini (2016–2025) terkait politik perempuan, dinasti politik, dan profil Puan Maharani. Analisis menunjukkan bahwa keberhasilan Puan dapat dipandang sebagai simbol emansipasi politik perempuan karena mampu menembus dominasi laki-laki di parlemen serta menginspirasi partisipasi politik perempuan lainnya. Namun, pencapaian tersebut juga tidak terlepas dari legitimasi genealogis sebagai bagian dari "Trah Soekarno" yang memberikan akses



terhadap modal sosial, simbolik, dan politik. Kesimpulannya, Puan Maharani menjadi simbol ganda: di satu sisi inspirasi emansipasi perempuan, tetapi di sisi lain representasi kuatnya dinasti politik yang berpotensi membatasi demokrasi substantif dan akses politik bagi perempuan di luar lingkaran elite.

Kata Kunci: Puan Maharani, Emansipasi Politik, Dinasti Politik.**PENDAHULUAN**

Fenomena politik di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari dominasi dinasti politik yang masih mengakar kuat. Banyak jabatan politik strategis, baik di tingkat nasional maupun daerah, diwariskan dari generasi ke generasi dalam lingkup keluarga tertentu. Praktik ini memperlihatkan bagaimana demokrasi Indonesia, yang seharusnya membuka ruang kompetisi politik secara luas dan setara, justru seringkali dipengaruhi oleh faktor genealogis dan pewarisan kekuasaan. (Wardani & Subekti, 2021) mencatat bahwa Salah satu calon perempuan dari dinasti politik yang memperoleh suara pribadi tertinggi adalah Puan Maharani, putri dari Ketua PDI-P dan mantan Presiden, Megawati Sukarnoputri, yang pada tahun 2019 berhasil memperoleh lebih dari 400.000 suara di daerah pemilihannya. Temuan ini menegaskan bahwa latar belakang dinasti sangat berperan dalam pembentukan profil politik Puan.

Di tengah fenomena tersebut, sosok Puan Maharani menjadi salah satu figur yang menonjol dalam peta politik Indonesia. Puan adalah perempuan pertama yang berhasil menduduki jabatan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Capaian ini kerap dipandang sebagai simbol penting dari emansipasi politik perempuan, (Setiawan, 2024) menegaskan bahwa “Puan Maharani merupakan simbol emansipasi politik perempuan yang mampu menembus dominasi laki-laki di ruang politik.” Hal ini dipertegas oleh (Saepudin & Kawuryan, 2022) yang menyatakan bahwa “Puan Maharani, Ketua DPR RI dapat disejajarkan dengan pemimpin wanita dalam parlemen dunia.” Dengan demikian, pencapaian Puan sering dihubungkan dengan upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam ruang politik Indonesia.

Namun demikian, perjalanan politik Puan Maharani juga tidak dapat dilepaskan dari statusnya sebagai cucu Presiden pertama Indonesia, Soekarno, serta putri dari Megawati Soekarnoputri, presiden perempuan pertama sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan. Identitas genealogis tersebut memberi Puan legitimasi politik yang sangat kuat sekaligus akses terhadap modal sosial, simbolik, dan politik yang tidak dimiliki oleh perempuan pada umumnya. (Sahyana et al., 2022) menekankan bahwa “Megawati Soekarnoputri dan Puan Maharani adalah pemimpin legislatif dan eksekutif yang mewakili perempuan,” yang menunjukkan bagaimana faktor keluarga berperan penting dalam karier politik mereka.

Dari sinilah muncul sebuah paradoks. Di satu sisi, Puan Maharani dapat dianggap sebagai bukti nyata kemajuan emansipasi politik perempuan. Tetapi di sisi lain, keberhasilannya juga mempertegas betapa kuatnya peran dinasti politik dalam menentukan siapa yang bisa mengakses kekuasaan. Pertanyaan kritis kemudian muncul: apakah keterlibatan Puan Maharani dalam politik benar-benar mencerminkan keberhasilan perjuangan kesetaraan gender, atau justru memperlihatkan bahwa jalur politik bagi perempuan masih sangat bergantung pada warisan politik keluarga? Pertanyaan ini penting untuk dikaji karena berimplikasi pada bagaimana kita memahami wajah demokrasi Indonesia, khususnya dalam hal keterwakilan perempuan.



Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana profil politik Puan Maharani terbentuk dari latar belakang keluarga, pendidikan, dan pengalaman politiknya?
2. Sejauh mana Puan Maharani dapat dipandang sebagai simbol emansipasi politik perempuan di Indonesia?
3. Bagaimana keterlibatan Puan Maharani sekaligus memperlihatkan kuatnya pengaruh dinasti politik dalam sistem politik Indonesia?
4. Apakah posisi Puan Maharani dalam politik lebih tepat dipahami sebagai bentuk kesetaraan gender atau justru sebagai reproduksi kekuasaan dinasti?

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyoroti paradoks antara emansipasi politik perempuan dan dinasti politik, tetapi juga mengkaji fenomena tersebut secara sistematis melalui analisis profil Puan Maharani, posisinya sebagai simbol emansipasi, simbol dinasti, serta pertanyaan kritis apakah keterlibatannya lebih merepresentasikan emansipasi atau dinasti.

Tujuan

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis sosok Puan Maharani dengan memperhatikan dua sisi utama, yaitu emansipasi politik perempuan dan dinasti politik keluarga. Analisis ini diharapkan mampu menjelaskan sejauh mana pencapaian Puan dapat dipahami sebagai representasi kesetaraan gender di Indonesia, sekaligus menyingkap peran kuat warisan politik yang menopang kariernya.

Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk menyoroti dilema representasi politik perempuan di Indonesia. Keterlibatan perempuan dalam politik tidak boleh hanya dilihat dari sisi simbolik atau keberadaan figur perempuan pada jabatan tinggi, tetapi harus ditelaah lebih jauh: apakah kehadiran mereka benar-benar membuka ruang demokrasi yang lebih setara, atau justru memperkuat dominasi elite lama melalui wajah baru. Dengan mengkaji kasus Puan Maharani, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada diskursus mengenai hubungan antara gender, dinasti politik, dan demokrasi di Indonesia, serta membuka ruang refleksi tentang arah emansipasi politik perempuan di masa mendatang.

Kerangka Teori

Teori Feminisme (Simone de Beauvoir)

Karya besarnya *Le Deuxième Sexe* (1949), yang ditulis oleh Simone de Beauvoir (1908-1986), menjadikannya salah satu tokoh penting dalam feminism gelombang kedua. Ia menekankan fakta bahwa perempuan secara historis diposisikan sebagai the Other (yang lain) dalam sistem patriarki (De Beauvoir, 2014). Menurut Beauvoir perempuan dibentuk oleh konstruksi sosial, bukan hanya kodrat biologis semata. Konsep ini mengkritik perspektif esensialis yang mengisolasi perempuan hanya dalam domain domestik dan biologis. sehingga membatasi fungsi mereka di lingkungan publik, termasuk lingkungan politik



Beauvoir membantah gagasan bahwa keterlibatan perempuan di ruang publik adalah satu-satunya cara untuk mencapai kesetaraan gender. Dia percaya bahwa kesetaraan yang benar adalah ketika perempuan memiliki kebebasan eksistensial, yang berarti mereka memiliki kebebasan untuk memutuskan pilihan mereka sendiri tanpa terpengaruh oleh stereotype, label, atau sistem kekuasaan yang diwariskan dari patriarki. Oleh karena itu, feminisme Beauvoir menekankan kritik terhadap struktur sosial yang membuat perempuan bergantung pada laki-laki atau sistem dominasi tertentu.

Kritik Gender dalam Perspektif Beauvoir

Dalam kerangka Beauvoir, keterlibatan perempuan di politik sering kali dikaitkan dengan warisan kuasa, simbolisasi, dan representasi semu. Feminisme Beauvoir juga menekankan bahwa meskipun perempuan tampak "berdaya" di ruang publik, relasi kuasa patriarki tetap mengontrol keberdayaan tersebut. Dengan kata lain, emansipasi gender tidak selalu terkait dengan representasi politik perempuan.

Beauvoir menegaskan bahwa perempuan kerap dijadikan "alat simbolik" untuk menunjukkan modernitas, demokratisasi, atau keterwakilan, padahal sesungguhnya posisi mereka tidak sepenuhnya otonom. Perempuan dalam struktur seperti itu hanya dipandang sebagai pelengkap dari sistem yang sudah ada, bukan sebagai agen perubahan yang independen. Hal ini menunjukkan adanya paradoks: kehadiran perempuan di puncak lembaga belum tentu setara bila otonominya dibatasi jaringan kekuasaan keluarga atau partai.

Teori Modal Politik (Pierre Bourdieu)

Pierre Bourdieu adalah seorang sosiolog Prancis (1930-2002). Dia terkenal dengan studinya tentang hubungan antara struktur sosial dan praktik sosial. Ia memperkenalkan ide tentang modal sebagai sumber daya yang mencakup selain aspek ekonomi, juga aspek sosial, budaya, simbolik, dan politik (Pierre Bourdieu, 1991). Menurut Bourdieu, arena sosial, termasuk arena politik, didefinisikan sebagai lapangan pertempuran di mana aktor bersaing untuk mempertahankan posisi mereka. Bourdieu menyatakan bahwa keberhasilan seorang aktor dalam politik ditentukan oleh akumulasi dan konversi berbagai jenis modal, bukan hanya kemampuan individu. Modal terkait dan dapat diperkuat melalui pendekatan tertentu. Dengan kata lain, modal memungkinkan seseorang memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Bourdieu membedakan modal menjadi beberapa jenis yang relevan untuk memahami posisi politik:

1. Modal Ekonomi

Berupa sumber daya materi, seperti kekayaan, finansial, dan aset ekonomi. Modal ekonomi dalam politik memungkinkan aktor mendanai kampanye, mengontrol sumber daya partai, atau meningkatkan pengaruhnya melalui pembagian kesejahteraan.

2. Modal Budaya

Terdiri dari pengetahuan, pendidikan, keterampilan, dan pengalaman yang diakui secara sosial. Dalam konteks politik, modal budaya ditandai dengan pendidikan formal, pengalaman dalam birokrasi atau legislatif, dan kemampuan retorika.



3. Modal Sosial

Seperti jaringan sosial, anggota kelompok sosial, dan hubungan dengan orang-orang penting. Modal ini sangat penting karena politik adalah bidang yang sangat bergantung pada hubungan, aliansi, dan dukungan kolektif.

4. Modal Simbolik

Merupakan legitimasi, kehormatan, atau prestise yang diakui oleh komunitas. Modal ini dikaitkan dengan reputasi, nama besar, atau citra moral seorang aktor. Modal ekonomi atau budaya yang signifikan tidak selalu mendukung modal simbolik untuk memberikan otoritas.

Menurut Bourdieu, konversi dari keempat modal di atas membentuk modal politik. Modal politik yang kuat berasal dari aktor yang dapat menggabungkan kekuatan ekonomi, budaya, sosial, dan simbolik dengan strategi tertentu. Modal politik tidak tetap; itu berubah sepanjang waktu, bergantung pada bagaimana para aktor mempertahankan dukungan dan legitimasi politik. Selain itu, ada aturan main di arena politik, atau doxa, yang menentukan modal mana yang lebih bernilai dalam konteks tertentu. Misalnya, di Indonesia, yang memiliki tradisi politik dinasti, modal simbolik yang terdiri dari "nama keluarga" mungkin lebih penting daripada modal budaya akademis.

Teori Elit dan Dinasti Politik (C. Wright Mills)

C. Wright Mills dalam buku klasiknya *The Power Elite* (1956) menyatakan bahwa kehidupan politik, ekonomi, dan militer di Amerika Serikat saat itu dikuasai oleh sekelompok kecil elit yang memiliki akses khusus terhadap sumber daya strategis (C. Wright Mills, 2000). Menurut Mills, demokrasi modern sering kali hanya memiliki sifat formal, sedangkan dalam penerapannya, kekuasaan masih terakumulasi pada beberapa kelompok yang memiliki posisi dominan di masyarakat. Mills menyebut kelompok ini sebagai elite kekuatan—sebuah jaringan kecil yang terbentuk oleh individu-individu berpengaruh, saling terkait melalui lembaga dan keluarga, serta mampu menjaga posisinya dari generasi ke generasi. Ide ini penting untuk mengkaji fenomena politik di berbagai negara, termasuk Indonesia, di mana kekuasaan sering terakumulasi pada keluarga tertentu melalui sistem dinasti politik.

Menurut Mills, elit politik bukan sekedar sekelompok orang yang menjalankan formalitas saja, tetapi juga merujuk pada mereka yang mempunyai pengaruh besar terhadap penyusunan keputusan penting. Pabrik Elit politik bukan sekedar sekelompok orang yang hanya menjalankan formalitas saja, melainkan juga merujuk pada mereka yang memiliki pengaruh besar terhadap penyusunan keputusan penting. Kekuasaan mereka tidak bukan berdiri sendiri, ia terhubung dengan modalitas ekonomi, sosial, dan simbolik. sebaliknya, ia terhubung dengan modalitas ekonomi, sosial, dan simbolik.

Fenomena gejala politik yang dinamis merupakan manifestasi spesifik dari kekuasaan elite. dinasti politik yang dinamis merupakan manifestasi spesifik dari kekuasaan elit. Dinasti politik terjadi ketika publik dihubungi secara berdasar pada silsilah oleh anggota di sebuah keluarga terkait, baik melalui partai politik, pemilu, maupun mekanisme colonial (Mukti & Rodiyah, 2020). Memungkin kan Hal ini kelompok elit untuk menilai dampak politik secara akurat sekaligus mengatasi masalah



kompetensi yang adil. Berdasarkan hal dari ini, politik Mills bukan sebagai bidang meritokrasi, melainkan sebagai bidang yang kerap dibahas oleh kelompok akademis yang memiliki akses ke sumber daya (Muhtadi, 2019).

Dari sudut pandang ini, menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih berakar pada struktur kekuasaan elit, di mana kewenangan politik bersifat eksklusif dan diskriminatif. Struktur kekuasaan tersebut bukan merupakan hasil langsung dari keterampilan politik, melainkan lebih merupakan kesadaran pegawai yang telah terbentuk dan memiliki akses terhadap jaringan kekuasaan.

Berdasarkan uraian teori diatas, dapat dimasukkan ke dalam kerangka konseptual singkat untuk memperlihatkan perbedan fokus dan implikasi dari masing-masing ahli dan teorinya. Kerangka ini berguna untuk membandingkan cara Beauvoir menekankan emansipasi perempuan, Bourdieu menjelaskan pentingnya modal dalam arena politik, dan Mills menekankan konsentrasi kekuasaan dalam dinasti politik. Perbandingan tersebut dapat dirangkum dalam tabel berikut:

| Aspek | Feminisme (Beauvoir) | Modal Politik (Bourdieu) | Dinasti Politik (Mills) |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Fokus utama | Emansipasi dan kebebasan eksistensial perempuan. | Modal sebagai daya politik (simbolik, budaya, ekonomi, sosial). | Fokus kekuatan pada kelompok elit. |
| Masalah yang dikritik | Patriarki dan representasi perempuan semu di politik. | Anggapan bahwa politik hanya berkaitan dengan kemampuan individu. | Ilusi demokrasi dan dominasi elit kecil. |
| Kunci konsep | <i>The other</i> , konstruksi sosial gender. | Capital (ekonomi, budaya, sosial, simbolik) = Capital Politique. | <i>Power elite</i> , jejaring elit, dinasti politik. |
| Cara kerja | Perempuan sering digambarkan sebagai simbol, tetapi mereka masih dikendalikan oleh struktur patriarki. | Aktor politik bersaing di arena dengan mengubah modal untuk mendapatkan legitimasi. | Keluarga dan institusi elit mewarisi kekuasaan. |
| Implikasi politik | Kehadiran perempuan tidak selalu berarti kesetaraan. | Akumulasi modal menentukan kekuatan politik. | Demokrasi semu, dominasi elit terbatas. |
| Contoh di Indonesia | Perempuan sebagai simbol keterwakilan (kouta), tetapi tetap terikat pada struktur patriarki. | Politisi dengan dukungan finansial, jaringan, reputasi. | Dinasti politik Soekarno, Suharto, Yudhoyono, Jokowi. |



METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi literatur atau tinjauan literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode studi literatur, merupakan cara untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel jurnal, dokumen resmi, dan laporan penelitian sebelumnya. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui pencarian literatur di database terakreditas seperti Garuda Kemdikbud, ProQuest, Scopus, SAGE Premier, SpringerLink, Taylor&Francis, serta repositori universitas dengan menggunakan kata kunci: emansipasi politik, dinasti politik, Puan Maharani, politik perempuan, politik Indonesia. Kriteria literatur yang dipilih dibatasi pada publikasi tahun 2016–2025, agar sesuai dengan perkembangan terbaru dalam diskursus politik dinasti dan emansipasi gender di Indonesia. Melalui metode ini sesuai dengan tujuan penelitian melakukan analisis kritis terhadap fenomena dinasti politik yang berkaitan dengan peran Puan Maharani dalam konteks emansipasi politik perempuan dan dinasti politik di Indonesia. Metode ini memungkinkan penelitian untuk menelaah secara mendalam dari berbagai sumber referensi jelas, selanjutnya informasi yang didapatkan dikumpulkan dan dianalisis dengan sistematis untuk menghasilkan ide-ide baru yang mendukung temuan penelitian yang sedang dilakukan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Profil Puan Maharani

Puan Maharani Nakshatra Kusyala Devi diketahui oleh masyarakat Indonesia sebagai putri satu-satunya dari Megawati Soekarno Putri (mantan Presiden RI ke-5) dengan suaminya Muhammad Taufiq Kiemas dan sebagai cucu Soekarno (Presiden RI pertama) ayah dari Megawati Soekarno Putri. Puan Maharani kerap kali dikenal sebagai suksesor dari keturunan Soekarno (Bung Karno) selaku kakek Puan. Puan Maharani membangun personal branding sebagai sosok politisi perempuan yang sukses berpartisipasi dalam politik dengan didukungnya reputasi sebagai Trah Bung Karno dan seorang putri Megawati Soekarnoputri label yang tertaut pada dirinya. Puan menempuh pendidikan di sekolah SD Perguruan Cikini (1985), SMP Perguruan Cikini (1988), SMA Perguruan Cikini (1991), dan berkuliah di Universitas Indonesia dengan jurusan Komunikasi Massa, FISIP (1997).

Puan Maharani pertama kali mencalonkan dirinya pada badan legislatif pada tahun 2009, saat itu, puan sukses meraih 242.504 suara pada daerah Jawa Tengah yang dimana juga menjadikannya caleg pilihan suara terbanyak di peringkat ketujuh. Pada pemilu 2014 Puan mencalonkan diri kembali dan ia berhasil dengan perolehan suara sebanyak 369.927 yang menjadikannya menginjak peringkat kedua sebagai caleg terpilih. Dipemilu 2019, Puan Maharani kembali lagi dengan suara terbanyak 404.034 suara dan caleg yang menempati peringkat pertama. Dan pada pemilu 2024 Puan Maharani memperoleh suara sebanyak 297.366 suara dan masuk dalam 10 besar mendapatkan suara terbanyak. Dilihat dari pendapatan suara pada tahun 2019 dan 2024 Puan Maharani berhasil menjabat sebagai Ketua DPR RI. Pada Pemilu 2024 baliho dan spanduk yang dilabelkan Puan Maharani sebagai “Cucu Bung Karno” dan “Putri Megawati Soekarnoputri” yang dapat dilihat politisi ini mulai menggunakan identitas primordial untuk strategi personal branding dirinya yang dikenal Trah Soekarno (M Almahrus, 2024).



Beberapa kebijakan yang dibuat oleh Puan Maharani selama menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan:

1. Meluncurkan situs revolusimental.go.id pada 24 Agustus 2016.
2. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
3. Mengawasi Kebijakan Sosial.

Dan kontribusi di DPR RI:

- 1) Menolak kenaikan harga Bahan Bakar (2013).
- 2) Mengawasi sektor ekonomi dan soial.
- 3) Sinergi dalam pemerintahan.

Puan Maharani sebagai Simbol Emansipasi

Puan Maharani kerap kali dilihat sebagai sosok perempuan dengan simbol emansipasi dalam politik di Indonesia, yang dapat dilihat dari beberapa kajian jurnal (Jamil et al., 2023). Puan memvisualisasikan dirinya sebagai tokoh perempuan yang tangguh, berkuasa, dan dapat melindungi keberagaman persatuan bangsa. Bukti salah satu symbol yang nyata adalah pada saat Puan memakai kebaya Kartini berwarna merah di agenda upacara HUT RI ke-79, Puan ditunjuk sebagai perwakilan semangat emansipasi perempuan khas RA Kartini. Puan Maharani mengatakan bahwa perempuan tidak hanya sebagai pelengkap, tapi juga harus menjadi penggerak, termasuk dapat membuat kebijakan dan pemimpin dengan tugasnya sebagai Ketua DPR RI dan pidato-pidato yang disampaikannya, Puan Maharani dengan tegas bahwa kontribusi perempuan dalam kedudukan strategis dan pedoman adalah bukti nyata emansipasi yang RA Kartini cita-citakan. Puan Maharani merupakan simbol emansipasi perempuan dengan memperlihatkan penguasaan aktif, menggunakan symbol kebaya merah dan memperjuangkan hak dan kredibilitas perempuan (Ariyanto et al., 2021).

1. Peran dalam Politik dan Emansipasi

Puan Maharani menampilkan semangat perempuan di dunia politik Indonesia. Ia membuat contoh aktual bagaimana perempuan dapat berkontribusi dan berdampak dalam bidang politik yang biasanya dipimpin oleh laki-laki. Eksistensinya sebagai seorang tokoh dalam politik pendahulu memperlihatkan kemajuan kesetaraan gender dan membuat ruang bagi perempuan lainnya untuk terlibat.

2. Kajian Epistemologi dan Gender

Semangat emansipasi pada Puan Maharani diuraikan melalui kacamata epistemologi yang menyatukan studi gender dan femenisme. Strategi ini dapat membantu mengetahui bagaimana Puan menemui banyak isu media dan politik dengan pemahaman akan hak dan independensi seorang perempuan.

3. Inventivitas bagi Perempuan di Indonesia

Puan Maharani menjadi salah satu sosok inspirasi bagi banyak perempuan di Indonesia untuk dapat aktif dan berpartisipasi dalam bidang politik dan publik. Pencapaiannya



memperlihatkan perempuan dapat mampu mendominasi dan ikut serta secara substansial dalam memimpin negara, dan memperjuangkan hak kesetaraan gender.

Puan Maharani sebagai Simbol Dinasti

Puan Maharani seringkali dianggap sebagai salah satu simbol utama yang merepresentasikan dinasti politik di Indonesia karena posisinya sebagai penerus garis keturunan tokoh-tokoh besar politik Indonesia. Berdasarkan garis keturunan keluarga Puan mewarisi jaringan politik keluarga yang sangat kuat dalam politik Indonesia sebagai anak dari Megawati dan cucu dari Soekarno, sehingga puan kerap mendapatkan label “Trah Soekarno” (Evandio, 2023).

Melihat pencapaian Puan dalam politik nasional mulai dari tahun 2009-2024 bisa dikatakan cukup cepat dalam mendapatkan posisi jabatan yang strategis hingga menduduki jabatan puncak saat ini. Hal ini didapatkan tidak terlepas dari jaringan dan pengaruh keluarganya yang cukup kuat dalam dunia politik Indonesia, dimana publik mengenal beliau sebagai anak dari Megawati dan cucu dari Soekarno. Puan dianggap sebagai kandidat yang kuat penerus kepemimpinan PDIP menggantikan ibundanya, Megawati Soekarnoputri. Ini menunjukkan keberlanjutan posisi elit dalam satu keluarga yang mendominasi struktur politik partai dan lembaga legislatif, serta hal ini sesuai dengan ciri khas dari suatu dinasti politik yang menempatkan keluarga sebagai pusat legitimasi kekuasaan politik. Bahkan dikatakan oleh pengamat politik bahwa Puan sudah menjalani persiapan pengambilan alih kepemimpinan menjadi ketum PDIP (Palguna, 2024).

Fenomena dinasti politik keterlibatan “Trah Soekarno” memperlihatkan adanya keterkaitan kekerabatan politik yang memperkuat jaringan dinasti politik di Indonesia, dan hal ini menggambarkan bagaimana kekuasaan politik dapat diwariskan antar generasi dalam keluarga tertentu. Puan merupakan bukti bagaimana warisan politik dari keluarga dapat membuka akses untuk meraih posisi-posisi yang strategis yang sulit dijangkau tanpa dukungan politik yang kuat. Ini juga menjadi contoh dimana dinasti politik berperan dalam membentuk elite politik yang menguasai kekuasaan formal maupun informal dengan perpindahan kekuasaan berdasar garis keturunan yang diwariskan dalam elite partai.

Emansipasi atau Dinasti?

Keterwakilan Puan Maharani sebagai pemimpin perempuan di parlemen pemerintahan, menjadi bukti partisipasi perempuan dalam politik Indonesia sudah mencapai perkembangan yang sangat signifikan. Hal ini merupakan salah satu kemajuan yang diharapkan dapat membawa perubahan pada kualitas kebijakan memadukan perspektif perempuan dan keadilan gender. Puan menjabat sebagai ketua DPR RI perempuan pertama, dan melakukan pembentukan Kauskus Perempuan Parlemen Indonesia (KPPRI) yang beranggotakan seluruh perempuan anggota DPR RI. Ini merupakan forum anggota parlemen khusus perempuan lintas partai yang memperjuangkan isu-isu perempuan dan kelompok marginal lainnya (Saepudin & Kawuryan, 2022).

Kehadiran Puan sebagai sosok perempuan pertama yang menjadi ketua DPR RI memberikan contoh harapan bagi perempuan lainnya untuk berkesempatan mengakses dan berpartisipasi dalam politik Indonesia (Widyasari, 2022). Gaya kepemimpinan Puan merepresentasikan perjuangan



emansipasi politik perempuan yang dari dulu dipinggirkan dan dianggap sebagai orang kedua, Puan berusaha untuk mematahkan stereotip ini agar tidak ada lagi kaum perempuan yang ditindas. Puan ingin membuktikan bahwa para kaum perempuan dapat menunjukkan kemampuan mereka dalam partisipasi politik hingga menjadi pemimpin, bahkan seringkali kepemimpinan perempuan lebih baik dari pada kaum laki-laki (Syahputra, 2022).

Namun posisi jabatan Puan tidak menutup jejak bahwa adanya dukungan yang cukup kuat dari garis keturunan keluarga sebagai “trah Soekarno”. (Nicholas Ryan Aditya, 2024) Meskipun PDIP dan Puan menegaskan bahwa karir yang dibangun oleh beliau didapatkan melalui proses kaderisasi dan demokrasi, namun posisi yang ia raih jelas didukung oleh statusnya sebagai keturunan tokoh politik berpengaruh di Indonesia. Tidakungkin seseorang pada saat pertama kali turun ke dalam dunia politik secara langsung mendapatkan dukungan suara yang sangat besar jika tanpa embel-embel keturunan keluarga elite politik.

Isu ini menimbulkan persepsi yang berlawanan dimana Puan menjadi simbol emansipasi perempuan dalam politik, sekaligus juga bagian dari sistem dinasti yang kerap menghadirkan ketidaksetaraan akses politik diluar keluarga elit. Kritik terhadap Puan sebagai simbol dari dinasti politik menekankan potensi dampak negatif yang dapat menghambat regenerasi politik, menutup peluang perempuan dari keluarga non-elite untuk naik, serta potensi terjadinya monopoli kekuasaan ditangan keluarga elite politik yang menimbulkan tantangan bagi demokrasi politik dan representasi perempuan dalam konteks yang lebih luas.

KESIMPULAN

Puan Maharani dalam politik Indonesia menempati posisi dua simbol yang saling bertolak belakang namun tidak dapat dipisahkan. Posisi ini yaitu sebagai bentuk emansipasi perempuan dan dinasti politik. Disatu sisi keberhasilan Puan mencapai posisi jabatan strategis mulai dari anggota DPR, Menteri Koordinator PMK, hingga ketua DPR RI dapat dilihat sebagai wujud emansipasi politik perempuan. Kehadiran Puan menjadi representasi berpengaruh bagi perempuan Indonesia untuk membuktikan bahwa partisipasi politik tidak lagi memiliki batasan yang didominasi oleh kaum laki-laki. Keterlibatannya dalam politik juga menjadi inspirasi bagi perempuan untuk ikut serta berpartisipasi pada proses dan pengambilan keputusan politik. Namun disisi lain, keberhasilan Puan dalam realita politik Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh dinasti politik. Sebagai putri Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan cucu Presiden pertama Soekarno, Puan kerap kali dipandang sebagai hasil legitimasi warisan kekuasaan keluarga. Hal ini menggambarkan bahwa akses dan kesempatan politik masih dipengaruhi oleh garis keturunan dan jaringan elite kekerabatan, sehingga ini memperkuat praktik dinasti politik yang meghambat demokrasi politik Indonesia.

Dengan demikian, Puan Maharani dapat dipandang sebagai simbol ganda, beliau merupakan bentuk inspirasi dan harapan emansipasi perempuan dalam politik Indonesia. Tetapi sekaligus juga sebagai representasi dinasti politik yang berpotensi membatas peluang perempuan lain diluar kalangan keluarga elite berkuasa.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ariyanto, P., Afina, M. N., Ghoni, A., & Khusna, A. (2021). Citra Perempuan Dalam Iklan Politik Puan “Kepak Sayap Kebhinnekaan.” *Academica : Journal of Multidisciplinary Studies*, 5(2), 197–214. <https://doi.org/10.22515/academica.v5i2.4162>
- C. Wright Mills. (2000). *THE POWER ELITE New Edition* (Vol. 17). Oxford University Press.
- De Beauvoir, S. (2014). The second sex. In *Classic and Contemporary Readings in Sociology*. <https://doi.org/10.4324/9781315840154-29>
- Evandio, R. (2023). STRATEGI PERSONAL BRANDING PUAN MAHARANI SEBAGAI CUCU BUNG KARNO & PUTRI MEGAWATI. *Indonesia Sosial Teknologi*, 4(7), 875–882.
- Hatmanti, G. A. P. N. Y., & Ahmad, N. (2023). Politisi dengan tingkat elektabilitas rendah dan strategi branding politik: analisis multimodalitas akun instagram puan maharani. *Jurnal Komunikasi Profesional*, 7(4), 583–611. <https://doi.org/10.25139/jkp.v7i4.5813>
- Jamil, H., Hamad, I., & Sari, Y. (2023). Personal Branding Puan Maharani Pada Akun Instagram @Puanmaharaniri Menuju Pemilihan Presiden 2024. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 6(2), 205–217. <https://doi.org/10.32509/pustakom.v6i2.2631>
- M Almahrus. (2024). INTERPRETASI FOLLOWERS PUAN MAHARANI MENGENAI CITRA DIRI SEBAGAI KETUA DPR RI PADA AKUN INSTAGRAM @PUANMAHARANIRI. *Reputasi*, 20(02), 98–107.
- Muhtadi, B. (2019). Populisme, Politik Identitas, dan Dinamika Elektoral (Populism, Identity Politics, and Electoral Dynamics). *UIN Syarif Hidayatullah*, 1–303.
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/54388/1/Populisme_Politik_Identitas_dan_Dinamika_Elektoral.pdf
- Mukti, H. H., & Rodiyah, R. (2020). DYNASTY POLITICS IN INDONESIA: TRADITION OR DEMOCRACY? *Journal of Law and Legal Reform*, 1(3), 531–538.
- Nicholas Ryan Aditya, D. P. (2024). *Politikus PDI-P: Puan Lahir dari Proses Pengkaderan, bukan Karena Situasi*. Kompas.Com.
https://nasional.kompas.com/read/2022/07/27/16495821/politikus-pdi-p-puan-lahir-dari-proses-pengkaderan-bukan-karena-situasi#google_vignette
- Palguna, F. A. (2024). *Pengamat Dinasti Politik Sebut Puan Maharani Sudah Disiapkan jadi Ketum PDIP*. Tempo.Co. <https://www.tempo.co/politik/pengamat-dinasti-politik-sebut-puan-maharani-sudah-disiapkan-jadi-ketum-pdip-55689>
- Pierre Bourdieu. (1991). Language and Symbolic Power. In *SubStance* (Vol. 22, Issue 2/3). <https://doi.org/10.2307/3685295>
- Saepudin, S., & Kawuryan, M. W. (2022). Komunikasi Politik dan Kepemimpinan Transformasional Perempuan dalam Parlemen. *Jurnal Pewarta Indonesia*, 4(1), 60–71. <https://doi.org/10.25008/jpi.v4i1.97>
- Sahyana, A. F., Nursyifa, D., Khaerunnisa, F. I., Triana, L., Lestari, T., & Laksono, B. A. (2022). Marginalization of Women’s Leadership in Politics and Government. *Progress In Social Development*, 3(2), 63–74. <https://doi.org/10.30872/psd.v3i2.46>
- Setiawan. (2024). SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak. *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 5(1), 72–84.



- Syahputra, M. (2022). Gaya Kepemimpinan Puan Maharani. *Researchgate.Net*, June, 0–15.
- Wardani, S. B. E., & Subekti, V. S. (2021). Political Dynasties and Women Candidates in Indonesia's 2019 Election. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(1), 28–49. <https://doi.org/10.1177/1868103421991144>
- Widyasari, A. (2022). Kepemimpinan Puan Maharani Sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Researchgate.Net*, June, 0–17. <https://www.researchgate.net/publication/361468051>
- (Hatmanti & Ahmad, 2023) Ariyanto, P., Afina, M. N., Ghoni, A., & Khusna, A. (2021). Citra Perempuan Dalam Iklan Politik Puan "Kepak Sayap Kebhinnekaan." *Academica : Journal of Multidisciplinary Studies*, 5(2), 197–214. <https://doi.org/10.22515/academica.v5i2.4162>
- C. Wright Mills. (2000). *THE POWER ELITE New Edition* (Vol. 17). Oxford University Press.
- De Beauvoir, S. (2014). The second sex. In *Classic and Contemporary Readings in Sociology*. <https://doi.org/10.4324/9781315840154-29>
- Evandio, R. (2023). STRATEGI PERSONAL BRANDING PUAN MAHARANI SEBAGAI CUCU BUNG KARNO & PUTRI MEGAWATI. *Indonesia Sosial Teknologi*, 4(7), 875–882.
- Hatmanti, G. A. P. N. Y., & Ahmad, N. (2023). Politisi dengan tingkat elektabilitas rendah dan strategi branding politik: analisis multimodalitas akun instagram puan maharani. *Jurnal Komunikasi Profesional*, 7(4), 583–611. <https://doi.org/10.25139/jkp.v7i4.5813>
- Jamil, H., Hamad, I., & Sari, Y. (2023). Personal Branding Puan Maharani Pada Akun Instagram @Puanmaharaniri Menuju Pemilihan Presiden 2024. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 6(2), 205–217. <https://doi.org/10.32509/pustakom.v6i2.2631>
- M Almahrus. (2024). INTERPRETASI FOLLOWERS PUAN MAHARANI MENGENAI CITRA DIRI SEBAGAI KETUA DPR RI PADA AKUN INSTAGRAM @PUANMAHARANIRI. *Reputasi*, 20(02), 98–107.
- Muhtadi, B. (2019). Populisme, Politik Identitas, dan Dinamika Elektoral (Populism, Identity Politics, and Electoral Dynamics). *UIN Syarif Hidayatullah*, 1–303. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/54388/1/Populisme_Politik_Identitas_dan_Dinamika_Elektoral.pdf
- Mukti, H. H., & Rodiyah, R. (2020). DYNASTY POLITICS IN INDONESIA: TRADITION OR DEMOCRACY? *Journal of Law and Legal Reform*, 1(3), 531–538.
- Nicholas Ryan Aditya, D. P. (2024). *Politikus PDI-P: Puan Lahir dari Proses Pengkaderan, bukan Karena Situasi*. Kompas.Com. https://nasional.kompas.com/read/2022/07/27/16495821/politikus-pdi-p-puan-lahir-dari-proses-pengkaderan-bukan-karena-situasi#google_vignette
- Palguna, F. A. (2024). *Pengamat Dinasti Politik Sebut Puan Maharani Sudah Disiapkan jadi Ketum PDIP*. Tempo.Co. <https://www.tempo.co/politik/pengamat-dinasti-politik-sebut-puan-maharani-sudah-disiapkan-jadi-ketum-pdip-55689>
- Pierre Bourdieu. (1991). Language and Symbolic Power. In *SubStance* (Vol. 22, Issue 2/3). <https://doi.org/10.2307/3685295>
- Saepudin, S., & Kawuryan, M. W. (2022). Komunikasi Politik dan Kepemimpinan Transformasional Perempuan dalam Parlemen. *Jurnal Pewarta Indonesia*, 4(1), 60–71.



<https://doi.org/10.25008/jpi.v4i1.97>

Sahyana, A. F., Nursyifa, D., Khaerunnisa, F. I., Triana, L., Lestari, T., & Laksono, B. A. (2022).

Marginalization of Women's Leadership in Politics and Government. *Progress In Social Development*, 3(2), 63–74. <https://doi.org/10.30872/psd.v3i2.46>

Setiawan. (2024). SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak. *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 5(1), 72–84.

Syahputra, M. (2022). Gaya Kepemimpinan Puan Maharani. *Researchgate.Net, June*, 0–15.

Wardani, S. B. E., & Subekti, V. S. (2021). Political Dynasties and Women Candidates in Indonesia's 2019 Election. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(1), 28–49. <https://doi.org/10.1177/1868103421991144>

Widyasari, A. (2022). Kepemimpinan Puan Maharani Sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Researchgate.Net, June*, 0–17.

<https://www.researchgate.net/publication/361468051>